



Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Parliamentary Event on Interfaith Dialog

21-24 November 2012, Nusa Dua, Bali

Plenary Session III : State and Religion-Learning from Best Practices of each Country in Building the Trust and Cooperation among Religions

Yang Terhormat Ketua Sidang,

Yang Terhormat para Delegasi,

Hadirin sekalian,

Pertama-tama, saya mewakili Parlemen Indonesia ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi Anda sekalian dalam forum ini. Saya mengharapkan agar forum ini dapat dimanfaatkan untuk berbagi *best practices* terkait bagaimana kita menciptakan sikap saling percaya dan kerja sama antaragama dan antarkepercayaan.

Kita yakin bahwa sikap saling curiga dan saling bermusuhan tidak saja bertolak belakang dengan *spirit* agama itu sendiri, namun juga hanya akan menimbulkan ketegangan dan kekerasan yang tidak perlu dan akan merugikan kita semua. Kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda: suku, bangsa, bahasa, warna kulit, agama, kepercayaan, tradisi, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Ini adalah fakta yang tak bisa dimungkiri.

Dalam konteks negara kami, Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau merupakan negara yang sangat beragam dan majemuk. Sebagai gambaran, negara berpenduduk sekitar 240 juta jiwa ini memiliki 1.128 suku bangsa dengan 741 bahasa. Kami bangsa Indonesia juga menganut beraneka ragam agama dan kepercayaan. Bahkan menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, kami memiliki ratusan agama dan kepercayaan asli Indonesia yang masih memiliki pengikut hingga saat ini.

Kami mengakui bahwa keragaman tersebut selain sebagai kekayaan tetapi sekaligus sebagai tantangan. Sebagai tantangan karena keragaman kerap bersinggungan dengan konflik horizontal. Demikian pula dikatakan sebagai kekayaan karena menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan beraneka ragam budaya.

Kami mengakui bahwa konflik horizontal yang dipicu oleh sentimen agama, suku-etnik, atau perbedaan-perbedaan lainnya juga ada di Indonesia. Namun harus diingat bahwa frekuensi konflik-konflik tersebut masih tergolong rendah dibanding tingkat keragaman dan kemajemukan yang ada.

Hadirin sekalian,

Agama dan kepercayaan merupakan entitas yang berada di tengah-tengah kita. Lebih dari itu, keduanya juga kerap kali menjadi faktor penentu terhadap cara pandang sebuah masyarakat dalam kadar dan dosis yang berbeda-beda. Bagi Bangsa Indonesia, agama dan kepercayaan, apapun itu jenisnya, diletakkan sebagai salah satu pilar negara dan unsur pemersatu. Dalam kaitan ini, para pendiri bangsa kami telah merumuskan sebuah konstitusi yang didasarkan atas keragaman dan kemajemukan tersebut, yang tersimpulkan dalam moto *Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity)*. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Semangat pluralitas yang didasarkan atas Bhineka Tunggal Ika itulah kemudian membuat para pendiri bangsa menyetujui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dan dalam pembukaannya menegaskan bahwa negara Indonesia diantaranya didasarkan atas 'Ketuhanan Yang Maha Esa'.

Penting dicatat bahwa dasar 'Ketuhanan Yang Maha Esa' ini tidak merujuk kepada agama atau kepercayaan tertentu, namun mencakup agama dan kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Atas pilar inilah kami berhasil membangun sikap saling percaya dan saling merajut kerja sama untuk mendirikan dan membangun Negara Indonesia yang sangat beragam ini.

Delegasi yang terhormat,

Konstitusi kami menjamin sepenuhnya kebebasan beragama. Jaminan tersebut tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 28e ayat (1), pasal 29 ayat (2). Konstitusi menegaskan jaminan negara atas kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya tersebut. Negara juga berkewajiban untuk melindungi setiap upaya penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Singkat kata, Indonesia tidak membatasi pengakuan dan perlindungan kepada beberapa agama saja, namun kepada semua agama dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia, tanpa kecuali. Demikian juga sistem perundang-undangan kami tidak mengenal agama negara/resmi dan agama minoritas dalam menjamin kebebasan beragama di masyarakat.

Untuk menjamin tumbuhnya sikap saling percaya (*mutual trust*) dan saling kerja sama antaragama dan kepercayaan, kami memandang bahwa hak kebebasan beragama harus dijalankan secara bertanggung jawab dan menghormati hak asasi orang lain. Untuk itu, dalam menjalankan kebebasan beribadah dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang serta kebebasan berekspresi dapat dimungkinkan dilakukan pembatasan berdasarkan hukum yang bertujuan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Hal tersebut terangkum dalam UUD 1945 pasal 28 ayat (2) dan pasal 18.

Delegasi yang terhormat,

Indonesia bukan negara agama. Namun Indonesia juga bukan negara yang menafikan peran agama. Hal ini lantaran kami sepenuhnya meyakini bahwa nilai-nilai religius merupakan salah satu sumber inspirasi bagi negara dalam menjalankan kewajibannya. Dalam kaitan inilah kami memiliki Kementerian Agama yang berdiri sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kementerian Agama adalah instansi pemerintah yang menjalankan tugas pokok untuk memberikan

pembinaan, pelayanan dan perlindungan kehidupan beragama kepada seluruh umat beragama di Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Kementerian Agama memainkan peran strategis dalam empat hal, yaitu dalam peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, pembinaan kerukunan antarumat beragama, peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta mengawal akhlak dan moral bangsa.

Melalui Kementerian Agama, Indonesia menginisiasi Forum yang berisikan tokoh-tokoh antaragama yang menjalin komunikasi intensif untuk kehidupan harmoni di Indonesia. Forum ini bernama Forum Kerukunan Umat Beragama. FKUB bahkan berdiri hingga di level provinsi, kabupaten dan kota.

Di level Parlemen, DPR sebagai tulang punggung legislasi nasional menyadari bahwa konflik adalah salah satu tantangan yang harus diatasi secara menyeluruh, termasuk diantara konflik sosial. Itu sebabnya kami baru-baru ini mengesahkan UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai payung hukum penanganan komprehensif konflik ini.

Sebagai kerangka hukum, DPR juga tengah dalam merumuskan dan menjaring aspirasi publik untuk menyusun RUU Kerukunan Umat Beragama. RUU ini berangkat dari tantangan yang ada dalam menjaga keragaman di Indonesia. Kami menyadari penuh, bahwa keberagaman memiliki sekat tantangan berupa konflik antarumat beragama. RUU ini akan memberikan naungan bersama, dan wadah penyelesaian bibit-bibit sengketa sosial tersebut. Sehingga keragaman tersebut dapat menjadi kekayaan bangsa yang terjaga harmonis secara sosial, politik dan legal.

Hadirin sekalian,

Kita harus menyadari bahwa persoalan utama yang kita dihadapi dewasa ini adalah masalah kebodohan, pengangguran, kemiskinan, terorisme, krisis lingkungan dan moral. Dalam kaitan ini, kami telah dan terus menjadikan agama sebagai salah satu elemen penting dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Sekadar contoh, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah Minggu, dan institusi-institusi pendidikan berbasis agama lainnya telah dan terus ikut memerangi kebodohan di negeri kami. Lebih jauh, dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan, lembaga-lembaga amal berbasis keagamaan seperti lembaga-lembaga amil zakat sejauh ini telah turut berperan dan memberikan kontribusi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengalaman-pengalaman di atas semakin meneguhkan kami bahwa agama dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi dunia yang lebih sejahtera dan damai. Bahkan jika sikap saling percaya dan kerja sama antaragama dan antarkpercayaan dapat dibangun secara baik maka dapat dipastikan akan memberikan sumbangan yang sangat positif bagi dunia yang lebih baik.

Kami berharap forum ini dapat memberikan energi positif untuk mendorong peran agama yang lebih besar guna pembangunan yang berkelanjutan untuk masa depan dunia yang lebih baik. Sekian.

Terima kasih.